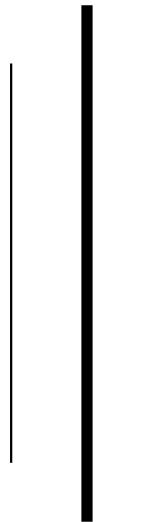


**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH KALIMANTAN BARAT  
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA**



**RENCANA STRATEGIS  
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN  
UDARA POLDA KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2025-2029**



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT  
NOMOR: KEP/ 3 /IX/2025 TANGGAL 15 SEPTEMBER 2025

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH KALIMANTAN BARAT  
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA



KEPUTUSAN DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALIMANTAN BARAT

Nomor: Kep / 3 / IX / 2025

tentang

PENETAPAN RENSTRA TAHUN ANGGARAN 2025-2029  
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA KALBAR

DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan perencanaan jangka menengah Ditpolairud Polda Kalbar, maka disusun Rencana Strategis Ditpolairud Polda Kalbar Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Polri, dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/814/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 tentang Grand Strategy Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/778/V/2025 tanggal 22 Mei 2025 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan....

- Memperhatikan:
1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
  2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  3. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Kep/285/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025 tentang Rencana Strategis Kepolisian Daerah Kalimantan Barat

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA KALIMANTAN BARAT TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025-2029;

1. Rencana Strategis Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
2. Rencana Strategis Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalimantan Barat dimaksud, berlaku untuk seluruh jajaran Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalimantan Barat, untuk dijadikan pedoman penyusunan Rencana Strategis;
3. Rencana Strategis Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kalimantan Barat menjadi dasar penjabaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Barat;
4. hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan tersendiri;

3 KEP. DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALBAR  
NOMOR : KEP / 3 / IX / 2025  
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2025

5. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : 15 September 2025



AGUSMAN, S.I.K.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75081004

## DAFTAR ISI

### KEPUTUSAN DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALIMANTAN BARAT

|                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DAFTAR ISI.....                                                                           | i   |
| DAFTAR GRAFIK.....                                                                        | iii |
| DAFTAR GAMBAR.....                                                                        | iv  |
| <br>                                                                                      |     |
| A. PENDAHULUAN.....                                                                       | 1   |
| 1. Kondisi Umum.....                                                                      | 1   |
| 2. Potensi dan permasalahan.....                                                          | 4   |
| a. Potensi dan Permasalahan Internal.....                                                 | 4   |
| b. Potensi dan Permasalahan Eksternal.....                                                |     |
| 3. Analisis SWOT.....                                                                     | 5   |
| B. VISI,MISI,TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....                                            | 14  |
| 1. Visi Polda Kalbar.....                                                                 | 14  |
| 2. Visi Ditpolairud Polda Kalbar.....                                                     | 15  |
| 3. Misi Polda Kalbar.....                                                                 | 15  |
| 4. Misi Ditpolairud Polda Kalbar.....                                                     | 15  |
| 5. Tujuan Polda Kalbar.....                                                               | 15  |
| 6. Tujuan Ditpolairud Polda Kalbar.....                                                   | 16  |
| 7. Sasaran Strategis Polda.....                                                           | 16  |
| 8. Sasaran Strategis Ditpolairud Polda Kalbar.....                                        | 18  |
| 9. Keterkaitan Sasaran Impact,Tujuan dan Sasaran Strategis Polda.....                     | 18  |
| 10. Keterkaitan Sasaran Impact,Tujuan dan Sasaran Strategis Ditpolairud Polda Kalbar..... | 18  |
| 11. Pentahapan Kebijakan.....                                                             | 18  |
| <br>                                                                                      |     |
| C. ARAH KEBIJAKAN,STRATEGI,KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....                | 20  |
| 1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Kalbar.....                                          | 20  |
| 2. Arah Kebijakan dan Strategi Ditpolairud Polda Kalbar.....                              | 36  |
| 3. Kerangka Regulasi.....                                                                 | 38  |
| 4. Kerangka Kelembagaan.....                                                              | 39  |
| <br>                                                                                      |     |
| D. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....                                             | 42  |
| 1. Target Kinerja.....                                                                    | 42  |
| 2. Kerangka Pendanaan.....                                                                | 43  |
| <br>                                                                                      |     |
| E. PENUTUP.....                                                                           | 44  |
| 1. Kaidah Pelaksana.....                                                                  | 44  |
| 2. Autentifikasi dan Distribusi.....                                                      | 45  |

ii LAMP KEP DIRPOLAIRUD POLDA KALBAR  
NOMOR: KEP/ 3 / IX / 2025  
TANGGAL: 15 SEPTEMBER 2025

LAMPIRAN B :MATRIKS KINERJA DITPOLAIRUD POLDA KALBAR TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN C :KERANGKA PENDANAAN DITPOLAIRUD POLDA KALBAR TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN D :KERANGKA REGULASI DITPOLAIRUD POLDA KALBAR TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN E :KERANGKA KELEMBAGAAN DITPOLAIRUD POLDA KALBAR TAHUN 2025-2029

## **RENCANA STRATEGIS DITPOLAIRUD POLDA KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025-2029**

---

### **A. PENDAHULUAN**

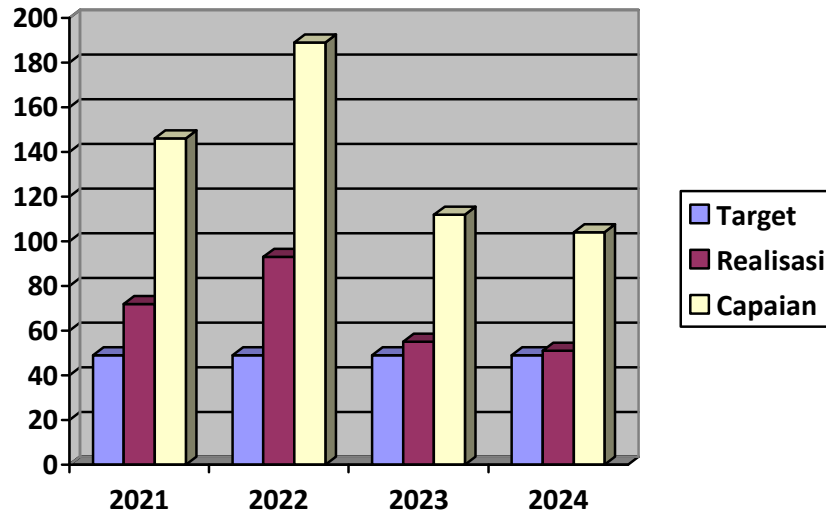
#### **1. Kondisi Umum**

Kondisi umum menjelaskan hasil evaluasi pencapaian Program dan kegiatan yang didasarkan pada sasaran dan/atau indikator kinerja yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya. Selain itu, kondisi umum menggambarkan yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda Kalbar. Evaluasi capaian Rencana Strategis (Renstra) Kepolisian Perairan dan Udara Daerah Kalimantan Barat tahun 2021-2024.

Kinerja Ditpolairud Polda Kalbar pada periode 2021-2024 menjadi acuan bagi rencana strategis (Renstra) Ditpolairud Polda Kalbar pada periode 2025-2029. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, kinerja Ditpolairud akan digambarkan dalam dua aspek utama yaitu, Indeks pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), Indeks penegakkan hukum (Gakkum), yang dilakukan Ditpolairud bagi masyarakat luas.

Pertama, indeks pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat mencerminkan kinerja Ditpolairud dalam memberikan jaminan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perairan Polda Kalimantan Barat. Kinerja ini akan berdampak pada kontribusi Ditpolairud pada pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam). Kinerja Indeks Harkamtibmas masyarakat cenderung mengalami Kenaikan sepanjang periode 2021-2024.

### INDEKS HARKAMTIBMAS



|           |      |      |      |      |
|-----------|------|------|------|------|
| Target    | 49   | 49   | 49   | 49   |
| Realisasi | 72   | 93   | 55   | 51   |
| Capaian   | 146% | 189% | 112% | 104% |

Grafik 1. Indeks Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Tahun 2021-2024

Grafik di atas dapat dijelaskan bahwa capaian tahun Kinerja 2021 sebesar 146% dengan rincian Target 49 dan Realisasi 72 Giat. Hal ini menunjukkan perbandingan Kinerja Patroli Perairan Kalbar tahun dengan tahun 2021 sudah baik, dikarenakan realisasi telah melebihi target yang ditetapkan.

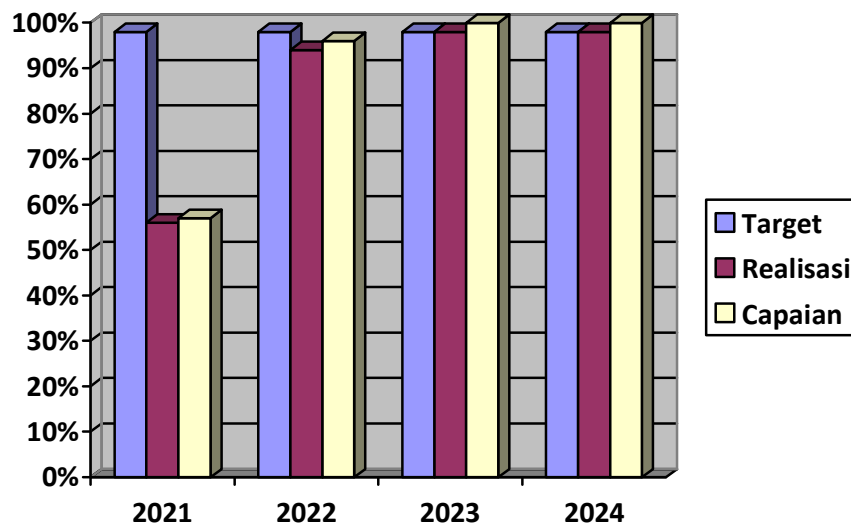
capaian kinerja pada indikator Jumlah Patroli Perairan Kalbar tahun 2022 sebesar 189%, mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 146% serta ada peningkatan dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 104%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja Ditpolairud Polda Kalbar di tahun 2022 dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2021 dan 2020.

Realisasi dan Capaian pada Indikator Patroli Perairan Kalbar Tahun 2023 telah melebihi target yang telah ditentukan. Capaian pada Tahun 2023 Patroli perairan kalbar 55 giat dengan persentase capaian 112%, hal ini juga tak lepas dari adanya penambahan anggaran Patroli Perairan pada saat penyusunan

anggaran menyesuaikan rencana pendistribusian anggaran Rorena Polda Kalbar T.A 2023.

capaian kinerja pada indikator Jumlah Patroli Perairan Kalbar tahun 2024 sebesar 104%, mengalami Penurunan dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 112% serta capaian tahun 2022 sebesar 189%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kinerja Ditpolairud Polda Kalbar di tahun 2024 namun capaian kinerja tersebut masih dapat mecapai target jangka menengah yang telah di tentukan.

### INDEKS TP. Umum di Perairan



|           |     |     |      |      |
|-----------|-----|-----|------|------|
| Target    | 98  | 98  | 98   | 98   |
| Realisasi | 56  | 94  | 98   | 98   |
| Capaian   | 54% | 96% | 100% | 100% |

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa Penyelesaian TP.Umum Perairan Kalbar Ditpolairud Polda Kalbar tahun 2021 dari target yang di tetapkan sebanyak 98 Kasus, Realisasi sebesar 56 Kasus dengan Capain 54%. Hal ini menunjukan kinerja Penyelesaian Tindak Pidana Umum Perairan Kalbar tahun 2021 masih kurang, dikarenakan realisasi belum mencapai target yang di tetapkan.

capaian kinerja pada indikator Persentase Penyelesaian TP. Umum diperairan tahun 2022 sebesar 96%, mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 54% dan ada peningkatan dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 45%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja Ditpolairud Polda Kalbar di tahun 2022 dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2021 dan 2020.

Realisasi dan capaian pada Indikator Penyelesaian TP. Umum di Perairan Tahun 2023 telah mencapai target yang di tentukan. Capaian Penyelesaian TP. Umum di perairan pada Tahun 2023 sebanyak 98 Kasus dengan persentase capaian 100%.

capaian kinerja pada indikator Penyelesaian TP. umum diperairan tahun 2024 sebesar 100%, capaian kinerja tahun ini setara dengan capaian tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan capaian kinerja indikator penyelesaian TP. Umum diperairan tahun 2024 sudah sangat baik.

## **2. Potensi dan Permasalahan**

### **a. *Potensi Gangguan Keamanan***

#### **1) *Pekembangan Aspek Kehidupan***

##### **➤ Geografi**

Luas wilayah Kalimantan Barat sebesar 147.307 km<sup>2</sup> atau 1,13 kali luas Pulau Jawa dan termasuk Provinsi terbesar ketiga setelah Provinsi Papua (319.036,05 km<sup>2</sup>) dan Kalimantan Tengah (153.564,50 km<sup>2</sup>), sedangkan keempat adalah Kalimantan Timur (129.873 km<sup>2</sup> setelah dikurangi Provinsi Kalimantan Utara). Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

- Bagian Barat berbatasan dengan Selat Karimata.
- Bagian Utara berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia Timur) dan Provinsi Kalimantan Timur.
- Bagian Selatan berbatasan dengan Provinsi KalimantanTengah serta Laut Jawa.
- Bagian Timur berbatasan dengan Provinsi KalimantanTengah dan Kalimantan Timur.

Daerah Kalimantan Barat termasuk daerah yang dapat dijuluki provinsi "Seribu Sungai" hal itu selaras dengan kondisi geografi yang

mempunyai.....

mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang diantaranya dapat dilayari, beberapa sungai besar yang sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman, walaupun prasarana darat telah dapat menjangkau 18 sebagian besar kecamatan. Sungai besar utama adalah sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia (1.086 Km) dan yang dapat dilayari sepanjang 942 km.

➤ **Ekonomi**

Kurang ketatnya pengawasan batas teritorial kelautan dan perikanan, belum semua daerah 24 kabupaten/kota menyelenggarakan log book perikanan dikarenakan belum tersedianya Syahbandar perikanan pada pangkalan pendaratan ikan, peningkatan kesejahteraan nelayan perbatasan dan masih lemahnya penegakan hukum, menjadi potensi meningkatnya gangguan terhadap sumber kekayaan laut dan habitatnya.

**b. Analisis SWOT**

Perumusan isu-isu strategis dilakukan sebagai upaya identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tugas Ditpolairud Polda Kalbar. Dalam mengidentifikasi isu strategis tersebut, terdapat dua garis besar yang perlu mendapat perhatian, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Aspek lingkungan internal mencakup kekuatan dan kelemahan yang merupakan potensi Ditpolairud Polda Kalbar dan perlu penanganan. Sedangkan aspek lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman yang mempengaruhi keberhasilan Ditpolairud Polda Kalbar. Dari perkembangan dan perubahan lingkungan strategis Ditpolairud Polda Kalbar tersebut diatas dilakukan analisa SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities dan Threats), yaitu:

**1) Kekuatan**

- a. Untuk mendukung pelaksanaan tugas di tahun 2025 Ditpolairud Polda Kalbar didukung dengan Piranti Lunak/dasar hukum berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kapolri sebagai berikut:
- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS;
  - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
  - 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
  - 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polisi Perairan;
  - 7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
  - 8) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polisi Perairan;
  - 9) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
  - 10) Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;
  - 11) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

- b. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara saat ini memiliki 219 orang personel dari DSP 290 orang personel dan terbagi atas beberapa bag dan subdit dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- 1) Direktur Polairud : KOMBESPOL AGUSMAN, S.I.K.
- 2) Wadir Polairud : -
- 3) Kabag Binopsnal : AKBP SALOOM PARDAMEAN SILABAN, S.H

Anggota Bagbinopsnal

- Perwira : 3 pers
- Brigadir : 5 pers
- Tamtama : - pers
- PNS : - pers

- 4) Kasubdit Gakkum : KOMPOL FEBY RANDO, S.I.K., M.H.

Anggota Subdit Gakkum

- Perwira : 5 pers
- Brigadir : 21 pers
- Tamtama : -
- PNS : 1 pers

- 5) Kasubdit Patroliairud : AKBP YOHANES ANDIS ARYA PANCA PUTRA, S.H., M.H.

Anggota Subdit Subdit Patroliairud

- Perwira : 6 pers
- Brigadir : 8 pers
- Tamtama : - pers
- PNS : - pers

- 6) Kasubdit Fasharkan : AKBP SUWANDI, S.Ag.

Anggota Subdit Subdit Fasharkan

- Perwira : 1 pers
- Brigadir : 8 pers
- Tamtama : - pers
- PNS : 1 pers

## 7) Kasubbagrenmin: AKP JUMARI SETIAWAN, S.H., M.Ap

- Perwira : - pers
- Brigadir : 84 pers
- Tamtama : 22 pers

## c. Sarana dan Prasarana yang mendukung tugas Ditpolairud Polda Kalbar adalah:

## 1) Kendaraan Bermotor umum

- (a) Sepeda Motor : B : 3 Unit
- (b) Mobil Patroli SUV : B : 1 Unit
- (c) Sedan : B : 1 Unit
- (d) Truck Sedang : B : 2 Unit
- (e) Bus Sedang : B : 2 Unit

## 2) Kendaraan Air

- (a) Kapal Patroli Polisi : RR 1 Unit, B 7 Unit,
- (b) Kapal Patroli Pantai : RR 3 Unit, B 4 Unit,
- (c) Speed Boat/Motor Tempel : RR 10 Unit, B 7 Unit,
- (d) Out Boat Motor : RR 1 Unit
- (e) Perahu Karet : B 7 Unit
- (f) Perahu Motor Tempel : B 1 Unit
- (g) Hover Craft : B 3 Unit
- (h) Kapal Pemburu Cepat : B 1 Unit
- (i) Long Boat : B 2 Unit

## 3) Alkom

- (a) Handy Talky (HT) : 90 Unit
- (b) Faximile : 1 Unit
- (c) Unit Tranceiver Ssb Portable : 12 Unit
- (d) Unit Tranceiver Ssb Stationery : 2 Unit
- (e) Unit Tranceiver HF Stationery : 2 Unit
- (f) Unit Tranceiver VHF Stationary : 2 Unit
- (g) Unit Tranceiver UHF Stationary : 4 Unit
- (h) Peralatan Antena VHF/FM Lainnya : 1 Unit
- (i) Antena UHF Stationary : 1 Unit
- (j) Alat RX Radio UHF : 1 Unit

(k) Charger.....

- (k) Charger : 15 Unit
- 4) Senjata Senpi
  - (a) Genggam : 55 Pucuk
  - (b) Senpi Bahu : 268 Pucuk
  - (c) SMR : 5 Pucuk
- 5) Alsus Kepolisian
  - (a) Borgol : RR : 30 Buah
  - (b) Tongkat Push Button : B : 1 Buah
  - (c) Rompi Anti Peluru : RR : 143 Buah
  - (d) Tabung Pemadam Api : RR : 200 Buah
  - (e) Senter Bawah Air : B : 8 Buah
  - (f) Alat Pemotong Stinger : RR : 7 Buah
  - (g) Genset : B : 2 Buah
- d. Tersedianya 1 Kapal Patroli dari Korpolairud Baharkam Polri
- e. Kepercayaan masyarakat terhadap Ditpolairud Polda Kalbar yang terus meningkat yang merupakan cerminan dari kesadaran masyarakat untuk peduli Kamtibmas dan turut serta berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri khususnya Ditpolairud Polda Kalbar dilapangan;
- f. Reputasi / kepercayaan Ditpolairud Polda Kalbar oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka penanganan kasus yang menjadi atensi pemerintah dalam hal penanganan *Trafficking in person, Illegal Logging, Illegal Mining, Illegal Trading, Illegal Fishing*, korupsi, narkoba, kasus penyeludupan kendaraan bermotor, pelanggaran lintas batas orang dan barang;
- g. Adanya koordinasi dan kerjasama Ditpolairud Polda Kalbar dengan instansi samping dan masyarakat dalam menghadapi tantangan tugas Ditpolairud di wilayah perairan Kalimantan Barat;

## 2) Kelemahan

- Jumlah personel Ditpolairud Polda Kalbar masih belum sesuai dengan DSP 290 Personel saat ini jumlah personel rill 219 personel;
- a. Personel Kapal dan Speed belum masuk dalam Struktur Organisasi karena belum ada Skep pengukuhan dari Kapolri;

b. Belum.....

- b. Belum memiliki Kapal Patroli Standar Khususnya Type B3 guna menunjang Patroli di Wilayah Perbatasan Negara;
- c. Belum memiliki Ranmor Ambulance dan Ran Air khusus SAR;
- d. Belum adanya Gudang Penyimpan Barang Bukti hasil tangkapan Ditpolairud Polda Kalbar sehingga mengalami permasalahan dalam penyimpanan barang bukti terhadap Kasus yang ditangani;
- e. Belum adanya dukungan anggaran Reklamasi sebelah kanan Mako Ditpolairud, Saluran Air di lingkungan asrama dan gedung Bin Opsnal dan Provost mengingat posisi gedung yang berada di tepi sungai yang mengalami abrasi mengingat factor usia bangunan yang sudah tua;
- f. Belum adanya Garasi Ran Air RIB, Mengingat adanya tambahan Sarana dan Prasarana yang di diterima oleh Satker Ditpolairud Polda Kalbar;
- g. Belum adanya Dok Kapal khususnya untuk mempermudah dalam pemeliharaan dan perawatan angkutan air yang di miliki oleh Ditpolairud Polda Kalbar.

### **3) Peluang**

- a. Ditpolairud Polda Kalbar merupakan salah satu satker Polda Kalbar penunjang Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berpotensi ditingkat menjadi Polda tipe A Khusus;
- b. Perubahan tatanan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya semakin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan;
- c. Adanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- d. Kebijakan Pemerintah Pusat yang memprioritaskan pembangunan di wilayah perbatasan sedang berjalan;
- e. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Kalbar kepada Ditpolairud Polda Kalbar dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat Pesisir Kalbar;
- f. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap Ditpolairud Polda Kalbar dalam bentuk partisipasi aktif berupa saran dan masukan serta informasi gangguan Kamtibmas melalui layanan pesan singkat

maupun.....

maupun secara langsung melalui nomor handphone para pejabat utama Ditpolairud Polda Kalbar;

- g. Semakin aktifnya kontrol eksternal dari DPR RI, DPRD, BPK, Komnas HAM dan LSM yang merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap Kinerja Ditpolairud Polda Kalbar dan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Ditpolairud Polda Kalbar dilapangan;
- h. Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri di Ditpolairud Polda Kalbar yang secara terus menerus berlanjut merupakan upaya percepatan pencegahan korupsi melalui program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK), hal ini memberikan peluang bagi Ditpolairud Polda Kalbar untuk dapat melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri yang mencakup aspek Struktural, Instrumental dan khususnya aspek Kultural.
- i. Rencana pemindahan ibukota negara maka Ditpolairud Polda Kalbar harus mempunyai konsep dan mampu memberi masukan terkait sistem keamanan, ketertiban dan kelancaran dijalur Perairan.

#### **4) Ancaman**

- a. Penanganan hoaks dan ujaran kebencian di era digital dan post truth. Media sosial dapat dikatakan sebagai salah satu ikon utama era digital. Salah satu wujud teknologi digital ini dikembangkan untuk memperkuat relasi sosial, pertemanan, dan kekerabatan. Namun penggunaan yang tidak semestinya oleh individu yang tidak bertanggung jawab telah menjadikan media sosial sebagai saluran untuk menyebarkan berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian (hate speech) dapat dimaknai sebagai bagian dari post truth yang merupakan saat dimana fakta alternatif menggantikan fakta aktual dan perasaan lebih berbobot dari pada bukti.

b. Penyebaran.....

- b. Penyebaran paham radikalisme dan intoleransi yang semakin mengganggu stabilitas dan keamanan nasional, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat.
- c. Hegemoni demokrasi telah menimbulkan potensi konflik pada masyarakat.
- d. Proses globalisasi dan kemajuan IPTEK juga menghadirkan berbagai ancaman dari segi ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya yang perlu diantisipasi.
- e. Peredaran Narkoba dan terorisme semakin marak dan telah pada taraf yang meresahkan masyarakat.
- f. Pemakin bertambah kejahatan berdimensi baru yang membutuhkan pengetahuan dan penanganan yang berbeda.
- g. Penyelundupan, pencurian terhadap sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup masih sering terjadi dan dapat merusak ketahanan dan keamanan pangan.
- h. Potensi bencana alam di Kalbar masih tinggi dan membutuhkan kesiapsiagaan Ditpolairud Polda Kalbar di dalamnya saat terjadi bencana.
- i. Masyarakat dan stakeholders masih belum merasakan bahwa Kamtibmas dan penegakan hukum adalah tanggung jawab bersama antara masyarakat dan Ditpolairud Polda Kalbar.
- j. Pulau-pulau terluar dan berpenghuni serta wilayah perbatasan perlu mendapatkan pengamanan khusus dari Ditpolairud Polda Kalbar.
- k. Masih terdapat konflik sosial yang pecah namun tidak terdeteksi secara komperhensif oleh fungsi Gakkum Ditpolairud Polda Kalbar.

**c. Permasalahan**

- 1) Kekuatan Rill personel Ditpolairud Polda Kalbar saat ini hanya 219 belum sesuai dengan DSP yaitu 290 Personel;
- 2) Wilayah Kalbar mempunyai panjang pantai 1.398 KM dan memiliki 218 pulau berpenghuni dan tidak berpenghuni, namun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Ditpolairud Polda Kalbar belum dapat menjangkau lokasi tersebut dalam jangka waktu singkat dikarenakan Kapal Patroli belum mencukupi jumlahnya dan Pos apung Ditpolairud belum ada untuk menjangkau pulau terluar di wilayah Perairan Ditpolairud Polda Kalbar;
- 3) Belum maksimalnya pelayanan Ditpolairud kepada masyarakat karena keterbatasan anggaran;
- 4) Belum adanya Gudang Penyimpan Barang Bukti;
- 5) Belum adanya fasilitas lapangan tembak dan kolam renang;
- 6) Belum adanya dukungan anggaran Reklamasi, Saluran Air dan Bangunan Mako mengingat posisi mako yang berada di tepi sungai yang mengalami abrasi mengingat factor usia bangunan yang sudah tua;
- 7) Belum adanya Garasi Ran Air RIB, Mengingat adanya tambahan Sarana dan Prasarana yang diterima oleh Satker Ditpolairud Polda Kalbar;
- 8) Belum adanya dok kapal khususnya untuk mempermudah dalam pemeliharaan dan perawatan angkutan air yang dimiliki oleh Ditpolairud Polda Kalbar;
- 9) Belum terpenuhi kapal patroli standar khususnya Type C1 guna menunjang patroli di wilayah pulau terluar dan perbatasan negara;
- 10) Belum adanya anggaran sertifikasi peningkatan kemampuan personel Ditpolairud Polda Kalbar

## **B. PENJABARAN VISI,MISI POLRI SERTA TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Guna menjawab berbagai tantangan dengan memperhatikan lingkungan strategis dan analisis *SWOT* sebagaimana disebutkan di atas, Ditpolairud Polda Kalbar menetapkan dan menjalankan Visi, Misi dan Tujuan sebagai suatu institusi dan kelembagaan yang mandiri, berwawasan global, berorientasi nasional dan bertindak lokal, penuh dengan koordinasi dan meningkatkan sinergisitas dalam memberikan dan melaksanakan pencegahan kejahatan dan penegakan hukum kepada masyarakat.

Dengan visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk bersinergi maka akan membangkitkan dan mendorong seluruh insan Kepolisian Indonesia menjadi semakin cerdas, berbudaya dan diimbangi dengan akhlak dan moral yang tinggi serta mampu meningkatkan daya kreativitas dan penuh inovatif dalam menghadapi tantangan tugas dan kehidupan masyarakat ke depan.

Penjabaran Visi dan Misi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

### **1. Visi Polda Kalbar:**

Visi Polda Kalbar mengacu pada visi Polri yang menetapkan visi organisasi sampai dengan tahun 2029, yaitu:

**“Terwujudnya Kalimantan Barat maju yang aman, tertib dan berkeadilan, melalui Kepolisian yang berorientansi pada masyarakat”**

Visi tersebut mengandung beberapa makna, yakni:

- a. Kalimantan Barat menjadi provinsi yang aman, bebas dari segala bentuk ancaman.
- b. Kalimantan Barat menjadi provinsi yang tertib guna mendukung terwujudnya Indonesia Emas.

## 2. Visi Ditpolairud Polda Kalbar:

Visi Ditpolairud Polda Kalbar mengacu pada visi Polri dan visi polda kalbar yang menetapkan visi organisasi sampai dengan tahun 2029, yaitu:

**"Terwujudnya Ditpolairud Polda Kalbar yang unggul dalam rangka Pemeliharaan Kamtibmas di Wilayah Perairan guna Mewujudkan Kalbar Maju".**

Visi tersebut mengandung beberapa makna, yakni:

- a. Terlaksananya keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Perairan Polda Kalimantan Barat
- b. Meningkatnya Penegakkan Hukum di Wilayah Perairan Polda Kalimantan Barat

Penjelasan kata-kata kunci dari kalimat visi tersebut mengandung beberapa makna, yakni "Mewujudkan Kepolisian Perairan sebagai pelayanan kamtibmas yang prima dan tegaknya hukum di perairan Polda Kalbar"

## 3. Misi Polda Kalbar:

**"Melindungi, Melayani, dan Mengayomi Masyarakat".**

## 4. Misi Ditpolairud Polda Kalbar:

**"Melindungi, Melayani, dan Mengayomi Masyarakat di Wilayah Perairan".**

## 5. Tujuan Polda Kalbar :

Berdasarkan visi dan misi Polri, maka tujuan Polda Kalbar adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri yang berintegritas, modern dan akuntabel dengan mengutamakan keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia serta mampu menjalankan peran utamanya dalam menegakkan hukum, melindungi masyarakat, dan menjaga kestabilan negara dengan cara yang lebih profesional dan responsif;
- b) Menciptakan dan menjaga kondisi sosial yang aman, stabil, dan tertib, dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat secara proaktif dan antisipatif
- c) Meningkatkan kualitas dan kapabilitas seluruh personel Polda Kalbar agar dapat menjalankan tugas dan fungsi kepolisian dengan profesional dan berintegritas melalui pengelolaan dan pengembangan SDM Polri yang terintegrasi.....

terintegrasi, holistik dan berkelanjutan;

- d) Membangun dan mengembangkan infrastruktur strategis Kepolisian yang mendukung operasional kepolisian yang efisien dan terintegrasi, pemeliharaan Kamtibmas yang optimal, pelayanan publik yang berkualitas, serta penegakan hukum yang lebih profesional sehingga dapat mendukung kinerja Polri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal;
- e) Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

## **6. Tujuan Ditpolairud Polda Kalbar :**

Berdasarkan visi dan misi Polda Kalbar, maka tujuan Ditpolairud Polda Kalbar adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri khususnya di wilayah perairan yang berintegritas, modern dan akuntabel dengan mengutamakan keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia serta mampu menjalankan peran utamanya dalam menegakkan hukum, melindungi masyarakat, dan menjaga kestabilan negara di wilayah perairan dengan cara yang lebih profesional dan responsif;
- b) Menciptakan dan menjaga kondisi sosial yang aman, stabil, dan tertib, dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat di wilayah perairan secara proaktif dan antisipatif
- c) Memperkuat tata kelola pemerintahan di wilayah perairan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

## **7. Sasaran Strategis Polda Kalbar:**

Mengacu kepada Sasaran Impact (SI) yaitu "Keamanan dan Ketertiban Masyarakat", maka sasaran strategis Polri 2025-2029 yaitu:

- a) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang Responsif dan Prediktif;
- b) Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan;
- c) Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polda Kalbar yang kompeten, Berintegritas dan adaptif secara Terpadu dan Optimal;

d) Infrastruktur.....

d) Infrastruktur strategis Kepolisian yang Berdaya guna dan Modern;

e) Tata Kelola yang Bersih,Transparan ,dan Akuntabel.

Keterkaitan Sasaran Impact “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Tujuan,

dan Sasaran Strategis

| TUJUAN |                                                                                                                                                                                                                                                          | SASARAN STRATEGIS |                                                                                                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.     | Menciptakan dan menjaga kondisi social yang aman,stabil,dan tertib,dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat secara proaktif dan antisipatif.                                                                                   | 1.                | Pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat yang responsif dan prediktif;                                        |
| 2.     | Meningkatnya pelayanan penegakan hukum yang mengutamakan kepastian, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, inklusivitas dan profesionalisme                                                                                                           | 2.                | penegakan hukum yang humanis, akuntabel dan berkeadilan                                                             |
| 3.     | Meningkatnya kualitas dan kapabilitas seluruh personel Polri agar dapat menjalankan tugas dan fungsi kepolisian dengan professional dan berintegritas melalui pengelolaan dan pengembangan SDM Polda Kalbar yang terintegrasi,holistik dan berkelanjutan | 3.                | Pengembangan dan pengelolaan SDM Polda Kalbar yang kompeten,berintegritas dan adaptif secara terpadu dan menyeluruh |
| 4.     | Tersedianya infrastruktur dan peralatan strategis yang mendukung operasional kepolisian pemeliharaan kamtibmas,pelayanan publik serta penegakkan hukum yang berkualitas,professional,efektif mudah diakses dan inklusif                                  | 4.                | infrastruktur strategis kepolisian yang berdaya guna dan modern                                                     |

|    |                                                                                                                                         |    |                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|
| 5. | Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat | 5. | Tata kelola yang bersih transparan,dan akuntabel |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|

#### 8. Sasaran Strategis Ditpolairud Polda Kalbar:

| TUJUAN |                                                                                                                                                                         | SASARAN STRATEGIS |                                                                              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| SS1    | Menciptakan dan menjaga kondisi social yang aman ,stabil,dan tertib,dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat secara proaktif dan antisipatif; | SS1               | Pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat yang responsif dan prediktif; |
| SS2    | Meningkatnya pelayanan penegakkan hukum yang mengutamakan kepastian,keadilan,perlindungan hak asasi manusia,inklusivitas dan profesionalisme                            | SS2               | Penegakkan hukum yang humanis,akuntabel dan berkeadilan                      |

#### 9. Pentahapan Kebijakan Ditpolairud Polda Kalbar

a) Tahun 2025

Menyempurnakan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja menjadikan organisasi dan SDM Ditpolairud Polda Kalbar yang adaptif,kompeten dan berintegritas;

b) Tahun 2026

Meningkatkan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja dalam Yanlik Polri yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang efektif,efisien dan terukur berbasis T.I serta didukung Almatsus Ditpolairud Polda Kalbar yang modern;

c) Tahun 2027

Meningkatkan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja dalam Yanlik Polri yang berorientasi pada kepercayaan masyarakat guna menjadikan

organisasi dan SDM Ditpolairud Polda Kalbar yang adaptif, kompeten dan berintegritas

d) Tahun 2028

Mewujudkan pelayanan publik Kepolisian yang adaptif dengan kebutuhan masyarakat, serta percepatan akuntabilitas kinerja birokrasi Polri dan budaya kerja Polri yang jelas, efektif dan efisien yang berbasis T.I menjadikan organisasi dan SDM Ditpolairud Polda Kalbar yang adaptif, kompeten dan berintegritas serta sejahtera;

e) Tahun 2029

Inovasi layanan publik Ditpolairud Polda Kalbar yang profesional dan berbasis T.I dalam rangka memudahkan akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam menggunakan platform layanan Kepolisian

## **C. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI POLRI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

### **1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Kalbar**

Arah kebijakan dan strategi Polda Kalbar diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi Polri serta arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan pada RPJPD Provinsi Kalbar diformulasikan dengan mempertimbangkan kondisi Polda Kalbar saat ini yang ingin dicapai oleh Polda Kalbar pada tahun 2029.

Arah kebijakan Polda Kalbar periode 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran Strategis “Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan fungsi intelijen dalam deteksi dini dan pencegahan ancaman dan gangguan serta memperkuat sistem keamanan negara secara responsif dan prediktif;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Penguatan fungsi intelijen di bidang politik, ekonomi, social, budaya, teknologi, dan lingkungan dalam negeri serta meningkatkan kolaborasi lintas fungsi dan layanan publik melalui data sharing (termasuk pemberitahuan potensi ancaman kepada fungsi terkait); (G.S)
- b) Meningkatkan peran deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi ancaman dan gangguan di bidang politik, ekonomi, social budaya, teknologi, dan lingkungan di dalam dan luar negeri dengan mengoptimalkan pengumpulan data intelijen/informasi dengan mengembangkan penyimpanan data digital terpadu/terpusat yang mengintegrasikan berbagai sumber input; (G.S)
- c) Mengoptimalkan operasi intelijen (penyelidikan, pengamanan dan penggalangan) terhadap potensi gangguan kamtibmas secara konvensional dan siber; (Asta Cita)

d) Meningkatkan.....

- d) Meningkatkan kemananan siber di lingkungan kepolisian;
  - e) Mengoptimalkan kegiatan kontra intelijen pencegahan terorisme,tindak pidana pencucian uang,serangan siber,perjudian online dan transaksi cryptocurrency; ( Asta Cita)
  - f) Meningkatkan peran deteksi dini serta pencegahan tindak pidana penyelundupan orang dan barang illegal; (Asta Cita)
  - g) Meningkatkan peran deteksi dini dan pengawasan terhadap potensi tindak pidana pencucian uang dan kebocoran keuangan negara; (Asta Cita)
- 2) Peningkatan upaya keamanan dalam pencegahan terorisme,aksi radikal,konflik social dan gangguan kamtibmas lainnya secara responsife dan prediktif
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) Meningkatkan kesadaran Kamtibmas di masyarakat melalui keterlibatan stakeholder terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam cegah tangkal Kamtibmas;
- 3) Menumbuhkembangkan paradigma dan perilaku yang berorientasi masyarakat (citizen-centric) dengan menanamkan prinsip-prinsip pemolisian masyarakat (community policing); (G.S, Quickwins)
- a) Mengoptimalkan pembinaan/penyuluhan terhadap penanggulangan bahaya judi dan judi online, kejahatan transnasional, dan penyelundupan barang ilegal; (Asta Cita)
  - b) Memperkuat sistem manajemen pemananan objek vital nasional dan objek vital lainnya yang rentan;
  - c) Mengoptimalkan pencegahan aksi terorisme, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya dengan cara memperkuat sinergitas dengan institusi penegak hukum lainnya (zero terrorist attack); (Asta Cita)

d) Meningkatkan.....

- d) Meningkatkan efektivitas layanan masyarakat melalui Smart Policing (misalnya, Smart Police Stations, hotline terintegrasi, police superapp, panic button); (G.S, Quickwins)
  - e) Mengoptimalkan penanggulangan ancaman gangguan Kamtibmas yang berintensitas tinggi di dalam negeri;
- 4) Peningkatan pemeliharaan keamanan,keselamatan dan pengakkan hukum di daerah hukum Polda Kalbar secara responshif dan prediktif

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menteapkan strategi sebagai berikut:

- a) Mengoptimalkan pengamanan perairan guna mendeteksi ancaman keamanan dan keselamatan di laut kalbar
  - b) Meningkatkan kolaborasi dan peran aktif msasyarakat pesisir dalam mendukung pengamanan laut;
- 5) Peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan kamseltibcarlantas;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kesadaran,keselamatan,ketertiban,kelancaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya; (G.S)
- b) Meningkatkan reliabilitas dan transparansi layanan administrasi lalu lintas dengan memperluas model layanan berbasis digital; (G.S, Quickwins)
- c) Mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda Kalbar;
- d) Meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas serta untuk menyempurnakan regulasi dan kebijakan lalu lintas; (G.S)

e) Meningkatkan.....

- e) Meningkatkan Turjawali ditengah masyarakat guna meningkatkan keamanan dan ketertiban di jalan raya
- 6) Peningkatan kehadiran polri di wilayah perbatasan dan pulau terluar,serta di lokasi prioritas dan pos lintas negara (PLBN) yang telah ditetapkan oleh BNPP ;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kehadiran Polri di wilayah kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP) dan kecamatan delinasi PKPP (Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan) dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN);
- b) Meningkatkan kegiatan pelacakan dan penangkalan serta pengakan hukum terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN baik di darat maupun laut
- 7) Peningkatan sistem kerja sama untuk memperkuat peran Polri dalam harkamtibmas yang responsif dan prediktif;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kerja sama dan sinergisitas dengan institusi pemerintah dan swasta untuk mewujudkan kemanan dan ketertiban masyarakat
- b) Meningkatkan peran dan kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan transnasional;
- c) Meningkatkan sumber informasi dan networking yang memadai melalui Interpol
- d) Meningkatkan sinergisitas dengan masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- e) Memperkuat sinergisitas antar institusi aparat penegakan hukum dalam pencegahan aksi terorisme, kelompok radikal, dan gangguan kamtibmas lainnya;

- 8) Penguatan kegiatan operasional Polri berbasis teknologi dan data analytics;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Mengembangkan manajemen operasi kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) yang berbasis data analytics guna meningkatkan kecepatan dan efektivitas respons Polisi dengan menerapkan mekanisme berbasis tingkat ancaman/kebutuhan penanganan kejadian; (G.S)
  - b) Mengelola data analytics dari media konvensional dan digital secara efektif dalam penguatan kegiatan operasional kepolisian dan membangun kepercayaan publik;
  - c) Meningkatkan penanggulangan berita negatif (hoaks) yang dapat mengganggu Kamtibmas berdasarkan media analytics;
  - d) Memperkuat sistem informasi Polri berbasis “Big Data Polri” dalam operasional Polri;
  - e) Melakukan pemutakhiran data kepolisian yang ter “update” secara akurat dan tepat waktu;
  - f) Menyempurnakan kemudahan dan reliabilitas tindak lanjut pengaduan masyarakat (misalnya, hotline, police superapp, Whats App for business); (G.S)
  - g) Meningkatkan kecepatan dan efektivitas respons Polisi berbasis tingkat ancaman/gangguan; (G.S)
- 9) Meningkatkan kehadiran Polri ditengah masyarakat secara optimal dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban nasional;
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) Mendukung pelaksanaan program pemerintah (Posyandu, penurunan stunting serta swasembada pangan);
  - b) Meningkatkan kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam menjaga Harkamtibmas;

c) Meningkatkan...

- c) Meningkatkan keamanan dan ketertiban kawasan pariwisata;  
(Asta Cita)
  - d) Menjaga keamanan jalur logistik dan transportasi nasional;  
(Asta Cita)
  - e) Menciptakan ruang publik dan fasilitas umum yang aman bagi penyandang disabilitas dan kelompok difabel; (Asta Cita)
  - f) Mendukung dan meningkatkan dukungan keamanan di kompetisi olahraga, kesenian dan budaya secara profesional dan berstandar internasional; (Asta Cita).
  - g) Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur Kepolisian  
(Asta Cita)
  - h) Mendukung dan memastikan tercapainya penyaluran subsidi kepada masyarakat secara tepat guna bagi masyarakat yang membutuhkan; (Asta Cita)
  - i) Menjunjung tinggi nilai Bhineka Tunggal Ika dan hak yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat;  
(Asta Cita)
  - j) Mendukung penanggulangan dan penanganan bencana secara profesional; (Asta Cita)
- 10) Peningkatan kegiatan sadar Kamtibmas bagi masyarakat;  
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - b) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi, penyelundupan manusia dan barang ilegal;
  - c) Memperkuat keterlibatan stakeholder terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam cegah tangkal Kamtibmas dan mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;

- 11) Peningkatan kegiatan pre-emptif dan preventif dalam perlindungan perempuan dan anak;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan sosialisasi terkait tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak; (Asta Cita)
- b) Menyelenggarakan layanan pengaduan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- b. sasaran Strategis “Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan secara transparan, akuntabel, dan berbasis ilmiah (Scientific Criminal Investigation);

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum dalam rangka ungkap kasus;
- b) Melaksanakan sertifikasi bagi penyidik siber Polda Kalbar guna mendukung penguatan pengamanan infrastruktur siber;
- c) Mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, siber, Illegal Mining, Illegal Fishing, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta penyelundupan manusia dan barang; (Asta Cita)
- d) Mengoptimalkan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana terorisme di dalam negeri; (Asta Cita)
- e) Melaksanakan penanganan konflik masyarakat secara humanis dan berkeadilan;

f) Mengoptimalkan.....

- f) Mengoptimalkan dukungan penanggulangan terorisme dalam rangka meminimalisir risiko (penyelamatan sandera, penjinakan bom dan lain-lain); (Asta Cita)
- g) Meningkatkan pemberantasan kasus-kasus perjudian serta menutup akses ke situs judi (termasuk judi online); (Asta Cita)
- h) Menangani kekhawatiran penduduk berjalan keluar di malam hari
- i) Memperkuat penerapan Scientific Crime Investigation (SCI) dalam pengolahan tempat kejadian perkara;
- j) Mengoptimalkan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba dan penyelundupan orang maupun barang; (Asta Cita)
- k) Meningkatkan keberhasilan dalam pengungkapan kejahatan di laut Indonesia; (Asta Cita)
- l) Memperkuat penegakan hukum yang adil, transparan, legal, humanis dan setara serta menyempurnakan proses pelaporan perkara melalui mekanisme dan sistem pelaporan terpadu di seluruh Polda Kalbar agar SOP dan Sistem Manajemen kasus terintegrasi; (G.S, Quickwins)
- m) Mengoptimalkan penanganan kejahatan transnasional di wilayah perbatasan;
- n) Memperkuat penerapan “keadilan restoratif serta peran mediasi” dalam penyelesaian konflik di masyarakat dan penegakan hukum terbata

2) Peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional yang terintegrasi;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antar satker Polda Kalbar dan aparat penegak hukum serta memperkuat adaptivitas penanganan kejahatan Polri melalui

pusat analisis tindak kejahatan dan Kerja Sama Internasional;  
(G.S)

- b) Mendukung pengembangan standardisasi data kriminal nasional;
- c) Memperkuat digitalisasi di lingkungan penegakan hukum guna menyempurnakan proses pelaporan perkara melalui mekanisme dan platform pelaporan terpadu di lingkungan Polri; (G.S)

- 3) Percepatan penanganan tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak secara humanis dan berkeadilan;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Melaksanakan penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan “keadilan restoratif” terhadap perempuan dan anak serta kaum disabilitas yang menjadi pelaku; (Asta Cita)
- b) Mengoptimalkan pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak; (KemenPPA)

- 4) Memberikan pelayanan penegakan hukum yang adil, transparan, humanis, dan akuntabel;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Menyediakan fasilitas rehabilitasi medis tindak pidana Narkoba;
- b) Membangun sistem penegakan hukum yang terbuka dan akuntabel;
- c) Mengoptimalkan SP2HP dalam penanganan perkara.

- 5) Peningkatan sistem kerja sama untuk memperkuat peran Polri dalam penegakan hukum yang transparan, akuntabel, humanis, dan adil;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kolaborasi dan sinergisitas antar organisasi dalam pemeliharaan dan peningkatan keamanan, serta penegakan hukum di laut; (Asta Cita)
  - b) Meningkatkan kerja sama nasional internasional di bidang penyelidikan dan penyidikan;
  - c) Memperkuat sinergisitas antar institusi aparat penegakan hukum dalam penanggulangan aksi terorisme, kelompok radikal, dan gangguan Kamtibmas lainnya.
- c. sasaran Strategis “Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polda Kalbar yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Menyeluruh” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kapabilitas dan kapasitas SDM Polda Kalbar yang jujur, bermartabat, dan berintegritas secara terpadu dan menyeluruh;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Polri yang berorientasi pada pelayanan publik serta memperhatikan kepuasan masyarakat;
- b) Meningkatkan jumlah SDM Polda Kalbar yang memiliki sertifikasi kompetensi; (Asta Cita)
- c) Meningkatkan jumlah pendidik yang telah memiliki sertifikasi kompetensi;
- d) Memperkuat kapasitas, kapabilitas dan integritas SDM Polda Kalbar yang berorientasi pelayanan masyarakat yang optimal;
- e) Menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Bhayangkara dalam diri personel Polri;
- f) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan operasional Polri berbasis teknologi dan data analytics;

g) Memperkuat.....

- g) Memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak; (Asta Cita)
- 2) Pengelolaan SDM secara profesional, akuntabel dan terintegrasi; Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) Meningkatkan pemenuhan jabatan berdasarkan standar jabatan dan kompetensi serta menarik minat dan mempertahankan talenta terbaik dengan mengartikulasikan kembali Employee Value Proposition (EVP) Polda Kalbar;
  - b) Memperkuat implementasi merit system, menyempurnakan sistem pengembangan karier dengan menerapkan personalized learning serta rotasi sesuai dengan kebutuhan personel dan organisasi; (G.S)
  - c) Menerapkan system reward and punishment berbasis kinerja;
  - d) Menyempurnakan sistem meritokrasi dan kolaborasi antar fungsi dengan merancang ulang sistem manajemen kinerja secara menyeluruh (termasuk memperkenalkan konsep shared KPIs dan mentorship); (G.S)
  - e) Meningkatkan proporsi Polwan; (RPJMN)
  - f) Meningkatkan kesejahteraan SDM Polda Kalbar (Asta Cita);
  - g) Meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi SDM Polda Kalbar secara adil dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku;
  - h) Meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi SDM Polda Kalbar secara adil dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku;
  - i) Memperkuat implementasi pemenuhan personel berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK);
  - j) Melakukan kajian dan pemenuhan kebutuhan personel untuk pembentukan Polsubsektor dan peningkatan tipe Polsek dan Polres dalam rangka pemekaran wilayah;
  - k) Meningkatkan kesehatan SDM Polda Kalbar secara fisik, psikis, dan mental;

d. Sasaran.....

d. Sasaran Strategis “Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Modernisasi sarana dan prasarana Polda Kalbar;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Memetakan dan menyempurnakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana Polda Kalbar tahun 2025-2029 dalam pemenuhan Almatasus Polda Kalbar untuk mendukung manajemen logistik dan fasilitas berbasis MEPE untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kesiapan operasional;
- b) Meningkatkan keselarasan TI dengan organisasi melalui penyempurnaan dan penerapan arsitektur TI Polda Kalbar (I.T Enterprise Architecture);
- c) Melakukan modernisasi sarana prasarana operasional pelayanan kepolisian sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) di tingkat Polda sampai ke wilayah Perbatasan dan PPKT;
- d) Melakukan modernisasi sarana dan prasarana operasional keamanan perairan (kapal patroli laut);
- e) Mengoptimalkan kemampuan digital dengan mengembangkan Data Digital Platform and Software (DDPS) serta pengembangan Artificial Intelligence (AI) Kepolisian yang terintegrasi dalam Satu Data Polri;
- f) Mendukung pembangunan dan memperkuat kapabilitas analitik Big Data/ Single Data Entry Polri untuk meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan strategis dan operasional Polri;
- g) Membangun dan mengimplementasikan smart security di Polda Kalbar;
- h) Menyiapkan pembangunan ruang dan fasilitas kerja bagi SDM Polda Kalbar berkebutuhan khusus;

i) Mengembangkan....

- i) Mengembangkan tata kelola dan sistem kearsipan dan naskah dinas yang modern;
  - j) Memperkuat sistem data dan informasi hukum Polri;
  - k) Meningkatkan sarana dan prasarana keamanan siber di lingkungan Polda Kalbar;
  - l) Mengintegrasikan sistem informasi dan komunikasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda dalam rangka Harkamtibmas dan Gakkum;
- 2) Pengelolaan aset kepolisian yang akuntabel, terbuka, modern dan terintegrasi;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Menyempurnakan sistem manajemen logistik dan fasilitas untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kesiapan operasional; (G.S)
- b) Menerapkan sistem pengelolaan dan membangun rumah dinas/flat/barak dan rusun bagi personel Polda Kalbar;
- c) Meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Polda Kalbar;
- d) Menyediakan dan meningkatkan kualitas dan fasilitas Kesehatan (rumah sakit/FKTP) dan layanan Kesehatan yang memadai bagi anggota Polri hingga tingkat Polres;
- e) Meningkatkan kualitas dan fasilitas kesehatan Polri (Rumah Sakit Bhayangkara) di jajaran Polda Kalbar yang paripurna dalam mendukung tugas dan fungsi Polri serta program nasional;
- f) Melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak.

e. Sasaran Strategis “Tata Kelola yang Bersih, Transparan dan Akuntabel” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Peningkatan pelayanan publik yang prima dan kedekatan dengan masyarakat;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polda Kalbar serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis Polri dengan menstandarisasi, menyempurnakan dan memastikan pelaksanaan SOP;
- b) Menyederhanakan proses pelayanan publik bagi masyarakat; (Asta Cita)
- c) Meningkatkan kemudahan akses terhadap pelayanan data dan informasi kriminal nasional;
- d) Meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan Polda Kalbar;
- e) Memperkuat keterlibatan Polda Kalbar dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dengan pendekatan secara personal serta meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui redesain interaksi kepolisian dan masyarakat;
- f) Meningkatkan pengelolaan citra Polda Kalbar di masyarakat;
- g) Memperkuat kerja sama antara masyarakat, TNI dan DPRD yang dapat mendukung kinerja Polri;
- h) Menyelenggarakan pelayanan Kesehatan dilakukan dengan kendali mutu dan biaya, disertai sarana dan prasarana Faskes yang memadai (BPJS Kesehatan);
- i) Meningkatkan efektivitas sistem pengaduan masyarakat; (Quickwins)

2) Penguatan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan Polri;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) Membangun.....

- a) Membangun sistem penerapan budaya integritas, nilai-nilai kejujuran dan kehormatan pada setiap pelaksanaan tugas kepolisian dengan memedomani kode etik Polri;
  - b) Mendorong perubahan budaya dengan merumuskan dan menginternalisasi nilai-nilai budaya organisasi yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi masyarakat; (G.S)
  - c) Meningkatkan manajemen kinerja Polri dari tingkat Polda sampai dengan Polsek;
  - d) Melakukan pengkajian dan penataan tusi (tugas dan fungsi) Polri di tingkat Polda sampai Kewilayahan guna mengonsolidasikan fungsi-fungsi tertentu di organisasi Polri dengan menciptakan model shared services; (G.S)
  - e) Memperkuat kelembagaan dan tata kelola organisasi Polri di tingkat Polda sampai Kewilayahan mewujudkan kapabilitas dan ukuran organisasi yang optimal (rasionalisasi organisasi) dengan menerapkan Strategic Workforce Planning;
  - f) Meningkatkan akuntabilitas dan agility dari organisasi dengan menyempurnakan model tata kelola dan model operasional; (G.S)
  - g) Melakukan pengkajian pembentukan satuan wilayah pada wilayah pemekaran;
  - h) Meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal guna meningkatkan adaptabilitas dan kelincahan organisasi dengan menyempurnakan sistem tata kelola; (G.S)
  - i) Memperkuat implementasi manajemen risiko hingga ke tingkat wilayah guna menciptakan budaya berbasis kepatuhan dan risiko dengan memperkuat kerangka kerja pengawasan, kepatuhan dan manajemen risiko Polri;(G.S)
- 3) Penguatan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akuntabel;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan.....

- a) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polda Kalbar;
  - b) Melakukan penyelarasan kinerja Polda Kalbar sampai ke tingkat wilayah dan jajaran pelaksana serta merancang ulang sistem manajemen kinerja dan metode penilaian kinerja;
  - c) Membangun alokasi anggaran pada klasifikasi jenis belanja secara proporsional;
  - d) Memperkuat akuntabilitas kinerja dan anggaran Polda Kalbar;
  - e) Memperkuat sistem dan kualitas pelaporan keuangan Polda Kalbar yang akuntabel, terintegrasi dan bersifat real time;
- 4) Penguatan regulasi dan sistem pengawasan yang efektif;
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) Meningkatkan kualitas penanganan komplain/pengaduan masyarakat secara efektif dan terpercaya;
  - b) Meningkatkan mekanisme pengelolaan bantuan hukum untuk kejahatan lintas negara dalam penanganan kejahatan lintas negara;
  - c) Meningkatkan efektivitas harmonisasi dan penyelarasan regulasi pemerintah daerah ke tingkat Polda Kalbar;
  - d) Mempercepat proses pemenuhan regulasi di lingkungan Polda Kalbar;
  - e) Meningkatkan kepatuhan terhadap penerapan regulasi di lingkungan Polda Kalbar.

## Arah Kebijakan Ditpolairud Polda Kalbar

Arah kebijakan dan strategi Ditpolairud Polda Kalbar diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi Polri serta arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan pada RPJPD Provinsi Kalbar diformulasikan dengan mempertimbangkan kondisi Polda Kalbar saat ini yang ingin dicapai oleh Polda Kalbar pada tahun 2029.

Arah kebijakan Polda Kalbar periode 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran Strategis “Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pemeliharaan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di daerah hukum Polda Kalbar secara responsif dan prediktif

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Mengoptimalkan pengamanan perairan guna mendeteksi ancaman keamanan dan keselamatan di laut kalbar
- b) Meningkatkan kolaborasi dan peran aktif masyarakat pesisir dalam mendukung pengamanan laut;

- 2) Peningkatan kehadiran Polri di wilayah perbatasan dan pulau terluar, serta di lokasi prioritas dan pos lintas negara (PLBN) yang telah ditetapkan oleh BNPP ;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kegiatan pelacakan dan penangkalan serta penegakan hukum terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN baik di darat maupun laut

b. Sasaran.....

- b. Sasaran Strategis “Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) Peningkatan sistem kerja sama untuk memperkuat peran Polri dalam penegakan hukum yang transparan, akuntabel, humanis, dan adil;  
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
    - a) Meningkatkan kolaborasi dan sinergisitas antar organisasi dalam pemeliharaan dan peningkatan keamanan, serta penegakan hukum di laut; (Asta Cita)
- c. Sasaran Strategis “Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) Modernisasi sarana dan prasarana Polda Kalbar;  
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalbar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
    - a) Melakukan modernisasi sarana dan prasarana operasional keamanan perairan (kapal patroli laut);

## 1. Kerangka Regulasi

Polri dalam rangka menjalankan roda organisasi memerlukan pedoman maupun aturan yang mengikat bagi anggotanya sendiri maupun terhadap masyarakat, karena tugas dan wewenang Polri yang diemban berkaitan dengan kepentingan masyarakat di bidang keamanan maupun penegakan hukum.

Renstra Ditpolairud Polda Kalbar yang merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan oleh Ditpolairud Polda Kalbar selain berisi perencanaan strategis, juga berisi tentang instrumen strategis yang berfungsi untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional yang tersusun dalam kerangka regulasi Ditpolairud Polda Kalbar. Kerangka regulasi pada Renstra Ditpolairud Polda Kalbar berisi tentang kebutuhan regulasi di lingkungan Ditpolairud Polda Kalbar yang bersifat mengikat kepada personel Ditpolairud Polda Kalbar maupun masyarakat yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang direncanakan akan dibuat atau direvisi selama 5 (lima) tahun ke depan yang sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029.

Kerangka regulasi dalam Renstra Ditpolairud Polda Kalbar tahun 2025-2029 memuat rencana pembuatan, penyempurnaan atau revisi Perkap yang dinilai perlu dan masih valid dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri dan juga rencana penghapusan Perkap yang dinilai sudah tidak valid terhadap situasi dan kondisi selama 5 (lima) tahun ke depan menggunakan pendekatan *omnibus law* yaitu strategi penataan regulasi dapat berupa pencabutan, revisi atau penggabungan dari beberapa regulasi yang saling tumpang tindih, sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

## 2. Kerangka Kelembagaan

Dalam memenuhi pelaksanaan pembangunan pemerintah yang efektif dan akuntabel, diperlukan suatu kerangka kelembagaan sesuai dengan program pembangunan Ditpolairud Polda Kalbar yang telah ditetapkan. Kelembagaan merujuk pada organisasi, pengaturan hubungan inter dan antarorganisasi, serta sumber daya manusia. Organisasi Ditpolairud Polda Kalbar mencakup tugas, fungsi, kewenangan, peran dan struktur. Pengaturan hubungan inter dan antarorganisasi mencakup tata hubungan kerja inter dan antarorganisasi Polri/lembaga pemerintah, sedangkan sumber daya manusia mencakup pejabat Polri dan aparatur sipil negara yang menjalankan organisasi tersebut. Aspek sumber daya manusia Ditpolairud Polda Kalbar di dalam kerangka kelembagaan mencakup jumlah dan kualitas, yang meliputi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap (*attitude*).

Tersedianya lembaga organisasi Ditpolairud Polda Kalbar yang efektif dan akuntabel merupakan salah satu syarat keberhasilan Polri dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mewujudkan Ditpolairud Polda Kalbar yang dapat melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Oleh karena itu, keberhasilan Ditpolairud Polda Kalbar dalam membangun organisasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses. Upaya penguatan kelembagaan di lingkungan Ditpolairud Polda Kalbar masih perlu dilanjutkan, mengingat masih belum optimalnya efektivitas pembangunan kelembagaan Ditpolairud Polda Kalbar, melalui ketepatan struktur, ketepatan proses (tata laksana) serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi guna meningkatkan efisiensi belanja Ditpolairud Polda Kalbar.

Prioritas penguatan kelembagaan Polri sesuai dengan tuntutan kebutuhan tugas terhadap ancaman gangguan Kamtibmas, akan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

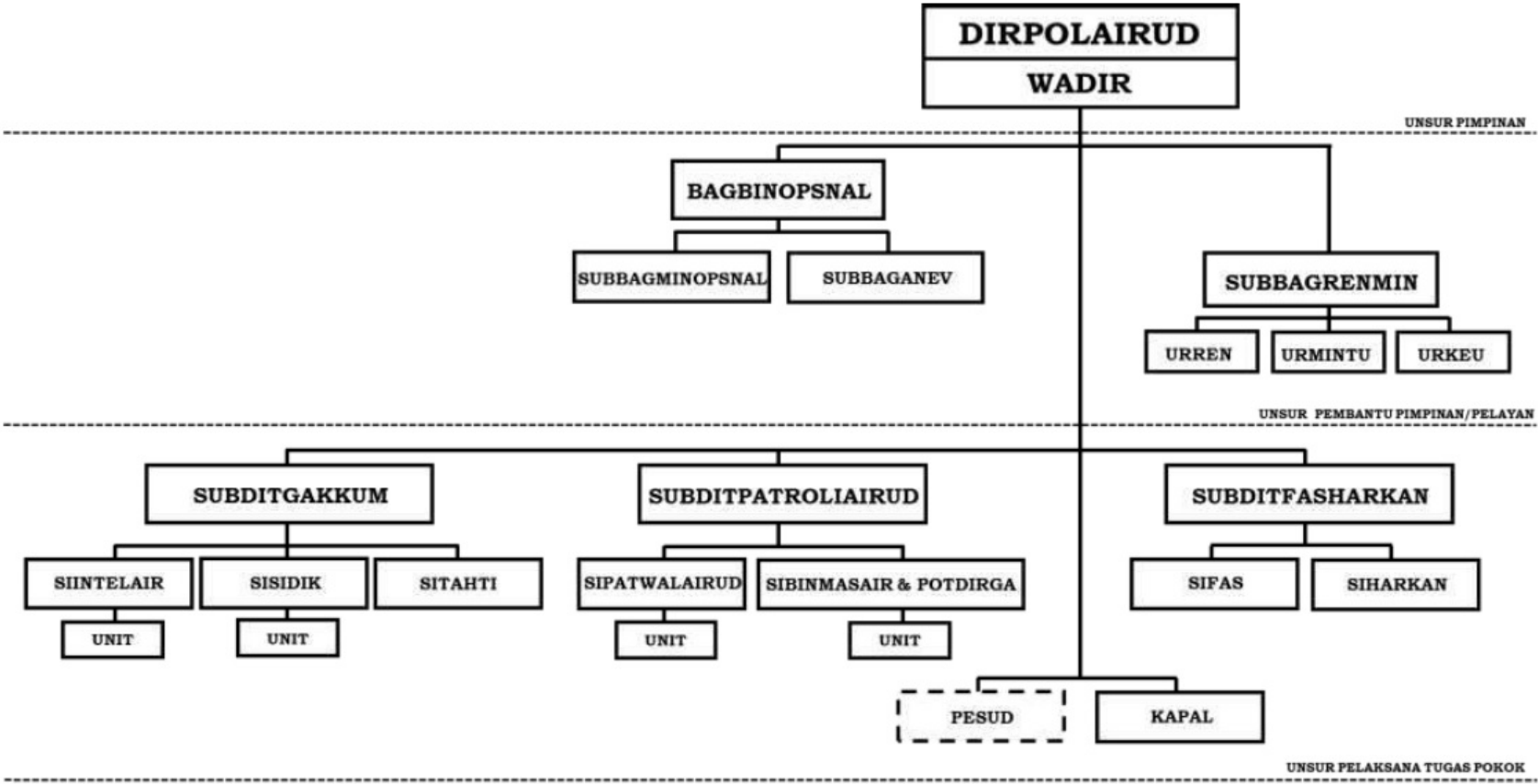
- a. implementasi penyusunan Daftar Susunan Personel (DSP) berdasarkan analisa beban kerja;
- b. implementasi revisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta monitoring pelaksanaannya;

c. penyusunan.....

- c. penyusunan nomenklatur/titelatur sesuai dengan hasil revisi/ penyempurnaan SOTK;

Dari arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang keamanan tersebut, maka untuk mewujudkan pencapaian sasaran dalam penguatan kelembagaan Ditpolairud Polda Kalbar, dibutuhkan kerangka kelembagaan sebagai

1. Struktur Organisasi Ditpolairud Tipe A



D. TARGET.....

## D. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 1. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi dan misi Ditpolairud Polda Kalbar, Ditpolairud Polda Kalbar menetapkan 3 (tiga) tujuan dan telah dilengkapi dengan 3 (tiga) sasaran strategis yang terbagi menjadi 2 (dua) sebagai satker maupun sebagai penanggungjawab IKU, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Ditpolairud Polda Kalbar dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis memiliki Indikator Kinerja Utama sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

#### a) Sebagai Satker

| Sasaran Strategis |                                                                     | Indikator Kinerja Utama |                                                                   | Target        |               |               |               |               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                   |                                                                     |                         |                                                                   | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
| SS1               | Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Responsif Prediktif | IKU1                    | Tingkat keamanan di Wilayah Perairan Kalimantan Barat             | 18,3<br>(3,3) | 19,9<br>(3,2) | 20,0<br>(3,1) | 19,4<br>(3,2) | 19,8<br>(3,2) |
| SS2               | Penegakkan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan           | IKU2                    | Clearance Rate Tindak Pidana di wilayah Perairan Kalimantan Barat | 100%<br>(5,0) | 100%<br>(5,0) | 100%<br>(5,0) | 100%<br>(5,0) | 100%<br>(5,0) |

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan beberapa Program di lingkungan Ditpolairud Polda Kalbar, yaitu sebagai berikut:

1. program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
2. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;

b) Sebagai.....

b) Sebagai Penanggung Jawab IKU

| Sasaran Strategis |                                                                     | Indikator Kinerja Utama |                                                                   | Target         |                |                |                |                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                   |                                                                     |                         |                                                                   | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
| SS1               | Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Responsif Prediktif | IKU1                    | Tingkat keamanan di Wilayah Perairan Kalimantan Barat             | 21,00<br>(3)   | 21,36<br>(3)   | 22,24<br>(2,8) | 21,52<br>(2,9) | 21,70<br>(2,9) |
| SS2               | Penegakkan Hukum yang Humanis,Akuntabel,dan Berkeadilan             | IKU2                    | Clearance Rate Tindak Pidana di wilayah Perairan Kalimantan Barat | 98,15<br>(4,8) | 99,35<br>(4,9) | 99,15<br>(4,9) | 98,87<br>(4,9) | 99,12<br>(4,9) |

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan beberapa Program di lingkungan Ditpolairud Polda Kalbar, yaitu sebagai berikut:

1. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
2. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;

## 2. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan dalam Bab terdahulu, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD, Dana Alokasi Khusus/DAK), swasta, perbankan/non perbankan, dan masyarakat. Pendanaan APBN KKP akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yakni fokus pada pada kepentingan untuk memberikan keamanan kepada masyarakat. Sementara itu dilakukan penguatan sinergi pendanaan antara Polri, K/L terkait serta APBD. Pendanaan juga diharapkan dapat dilakukan melalui operasionalisasi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) serta kredit yang disalurkan melalui perbankan. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana terlampir.

## **E. PENUTUP**

Rancangan Rencana Strategis Ditpolairud Polda Kalbar Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah Ditpolairud Polda Kalbar, yang disusun dengan menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Polri dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang perlu direviu secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lingkungan strategis, dan arah bijak Polri. Oleh karena itu, peran aktif dari seluruh Satker dan personel Ditpolairud Polda Kalbar sangat diperlukan kontribusinya untuk mengimplementasi Renstra Ditpolairud Polda Kalbar Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga keamanan dan ketertiban nasional dapat terpelihara.

### **1. Kaidah Pelaksana**

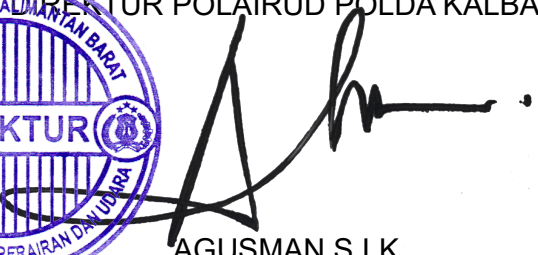
- a. Mengutamakan sistem pelayanan publik kepolisian yang prima dengan menghadirkan negara (Polri) ke tengah-tengah masyarakat, yakni memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminasi, dengan tetap mengedepankan standar etika yang tinggi;
- b. Pentingnya mengutamakan tindakan preemtif dan humanis sebagai *civilian police* menuju *democratic policing*;
- c. Mengedepankan *strategi community policing*. Perkembangan ke depan, perlu dilakukan perubahan pola upaya penanganan dari tindakan reaktif menjadi proaktif agar tercipta suasana kondusif dengan meminimalkan jatuhnya korban, serta tetap berkomitmen terhadap efisiensi anggaran;
- d. Selalu membangun kemitraan melalui sistem sinergi polisional dengan kementerian, lembaga, serta kearifan lokal lainnya, sebagai implementasi strategi Polmas dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan masyarakat tertib hukum.

## 2. Autentikasi dan distribusi

- a. Autentikasi Renstra Ditpolairud Polda Kalbar berikut merupakan jabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang telah disahkan oleh Direktur Polairud Polda Kalbar sebagai pimpinan lembaga sekaligus sebagai pejabat pengguna anggaran;
- b. Distribusi, selanjutnya akan didistribusikan kepada seluruh jajaran Satker untuk dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan dan dipedomani oleh penanggung jawab program guna pencapaian *outcome*.

Ditetapkan di: Pontianak  
pada tanggal: 15 September 2025



DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALBAR  
  
AGUSMAN, S.I.K  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 75081004

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH KALIMANTAN BARAT  
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA

---



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / 499 / IX / REN.2.3. / 2025

Pertimbangan: bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis, Manual IKU, Rencana Kerja Ditpolairud Polda Kalbar Tahun 2025-2029 dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1008/VII/2025 tanggal 4 Juli 2025 tentang Manual Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Penunjang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

3. Surat Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Nomor: B/51/I/REN.2.3./2024/Srena tanggal 15 Januari 2024 hal jukrah terkait penyusunan Renstra Polri tahun 2025-2029 dan Renja Polri tahun 2025;

4. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Sprin/415/III/REN.2.3./2024 tanggal 7 Maret 2024 tentang tim kelompok kerja dan penanggung jawab Renstra Polda Kalbar tahun 2025-2029.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT, JABATAN DAN KESATUAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai kelompok kerja dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis T.A. 2025-2029, Manual IKU T.A. 2025-2029 dan Rencana Kerja Ditpolairud Polda Kalbar T.A. 2026;

2. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

3. melaksanakan .....

SPRIN DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALBAR

NOMOR : SPRIN/ 499 /IX/REN.2.3./2025

TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2025

3. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Pontianak

pada tanggal : 1 September 2025



DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALBAR

AGUSMAN, S.I.K

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75081004

Tembusan :

1. Kapolda Kalbar.
2. Irwasda Polda Kalbar.
3. Karorena Polda Kalbar.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH KALIMANTAN BARAT  
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA

SPRIN DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALBAR  
NOMOR : SPRIN/ 499 /IX/REN.2.3./2025  
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2025

**DAFTAR NAMA PERSONEL KELOMPOK KERJA DALAM RANGKA  
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS T.A. 2025-2029, MANUAL IKU T.A. 2025-2029 DAN RENCANA KERJA T.A. 2026  
SATKER DITPOLAIRUD POLDA KALBAR**

| NO  | N A M A                                       | PANGKAT   | NRP                | JABATAN                                     |                         |
|-----|-----------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|     |                                               |           |                    | STRUKTURAL                                  | POKJA                   |
| 1   | 2                                             | 3         | 4                  | 5                                           | 6                       |
| 1.  | AGUSMAN,S.I.K.                                | KOMBESPOL | 75081004           | DIREKTUR POLAIRUD                           | PENANGGUNG JAWAB        |
| 2.  | JUMARI SETIAWAN, S.H., M.A.P.                 | AKP       | 79010114           | KASUBBAGRENMIN                              | KETUA PELAKSANA         |
| 3.  | ERVINNAH                                      | PENATA    | 198007072006042006 | PS. KAUREN SUBBAGRENMIN                     | SEKRETARIS              |
| 4.  | MUHAMMAD NADHIF SETIAWAN, S.Sos.,<br>M.Sos    | IPDA      | 89090129           | PAMIN 1 SUBBAGRENMIN                        | ANGGOTA                 |
| 5.  | FRI ANGGRENI                                  | BRIPKA    | 89080415           | BAMIN UREN SUBBAGRENMIN                     | ANGGOTA                 |
| 6.  | RAHMAT GATRA KENCANA                          | BRIGPOL   | 91070173           | BAMIN UREN SUBBAGRENMIN                     | ANGGOTA                 |
| 7.  | RIONALDO CAPRI                                | BRIPDA    | 04080274           | BAMIN UREN SUBBAGRENMIN                     | ANGGOTA                 |
| 8.  | DANIEL                                        | BRIPDA    | 03081309           | BAMIN UREN SUBBAGRENMIN                     | ANGGOTA                 |
| 9.  | SALOOM PARDAMEAN SILABAN,S.H.                 | AKBP      | 74090806           | KABAGBINOPSNAL DITPOLAIRUD                  | TIM BAG BINOPSNAL       |
| 10. | APEP SYAMSUL HAKIM, S.IP.                     | KOMPOL    | 69010379           | KASUBBAGMINOPSNAL BAGBINOPSNAL              | ANGGOTA                 |
| 11. | SAMSUL MA'ARIF, S.H.                          | AKP       | 76110149           | PS. KASUBBAGMINOPSNAL BAGBINOPSNAL          | ANGGOTA                 |
| 12. | SYAMSUDIN                                     | AIPDA     | 84041597           | BAMIN BAG BINOPSNAL                         | ANGGOTA                 |
| 13. | FEBY RANDO, S.I.K., M.H.                      | KOMPOL    | 87021332           | PS. KASUBDITGAKKUM                          | TIM SBDT GAKKUM         |
| 14. | EDY WURIYAWAN, S.H., M.H.                     | IPTU      | 82060057           | KANIT 1 SISIDIK SUBDITGAKKUM<br>DITPOLAIRUD | ANGGOTA                 |
| 15. | ABDUL KADIR JAILANI                           | BRIGPOL   | 92040072           | BAMIN SUBDIT GAKKUM                         | ANGGOTA                 |
| 16. | SUWANDI, S. Ag                                | AKBP      | 73050635           | KASUBDIT FASHARKAN                          | TIM SBDT FASHARKAN      |
| 17. | ISHAK PULUNGAN, A.Md.                         | AIPDA     | 83111349           | BANIT FASHARKAN                             | ANGGOTA                 |
| 18. | IYAN NURDIYAN                                 | BRIPKA    | 79051526           | BANIT FASHARKAN                             | ANGGOTA                 |
| 19. | YOHANES ANDIS ARYA PANCA PUTRA,<br>S.H., M.H. | AKBP      | 74120887           | KASUBDIT PATROLIAIRUD                       | TIM SUBDIT PATROLIAIRUD |
| 20. | AGUS MULYADI, S.Kom                           | KOMPOL    | 73030714           | KASI PATWALAIRUD                            | ANGGOTA                 |
| 21. | AAM KUDUSSALAM, S.H.                          | KOMPOL    | 69100126           | KASIBINMASAIR SUBDIT PATROLIAIRUD           | ANGGOTA                 |
| 22. | SUDIRMO, S.H.                                 | AIPDA     | 85041152           | PS. PANIT UNIT 2 SIBINMASAIR                | ANGGOTA                 |
| 23. | HERY MARTONO                                  | AKP       | 69030199           | KAUR KEU DITPOLAIRUD                        | TIM SUBBAG RENMIN       |

SPRIN DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALBARNOMOR : SPRIN/ 499 /IX/REN.2.3./2025TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2025

| 1   | 2                             | 3       | 4                  | 5                          | 6       |
|-----|-------------------------------|---------|--------------------|----------------------------|---------|
| 24. | SUHAIRI, A.Md.                | PENATA  | 197401042003121003 | PS. KAURMINTU SUBBAGRENMIN | ANGGOTA |
| 25. | I DEWA GEDE DWIYADNYANA, S.H. | AIPDA   | 85120491           | PS. PAMIN 3 SUBBAGRENMIN   | ANGGOTA |
| 26. | NENDRA DN, S.H.               | AIPDA   | 81110495           | PS. PAMIN 4 SUBBAGRENMIN   | ANGGOTA |
| 27. | DANU WIKOCO                   | AIPDA   | 85041075           | PS. PAMIN 2 SUBBAGRENMIN   | ANGGOTA |
| 28. | TONI WIBOWO, S.H.             | BRIPKA  | 86041778           | PS. PAMIN 6 SUBBAGRENMIN   | ANGGOTA |
| 29. | MUHAMMAD KHAFID               | BRIGPOL | 92110044           | BAMIN SUBBAGRENMIN         | ANGGOTA |
| 30. | ADYTIA DETA GEMILANG          | BRIPTU  | 00050061           | BAMIN SUBBAGRENMIN         | ANGGOTA |
| 31. | KUSWARDANI, S.H.              | BHARAKA | 94060008           | TAMIN SUBBAGRENMIN         | ANGGOTA |
| 32. | TRI YUNIAWATI                 | BRIPTU  | 95061043           | BAMIN SUBBAGRENMIN         | NOTULEN |
| 33. | AYU SEFTISARI, S.H.           | BRIPTU  | 99090097           | BA DITPOLAIRUD             | NOTULEN |

Dikeluarkan di : Pontianak

pada tanggal : 1 September 2025



DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALBAR

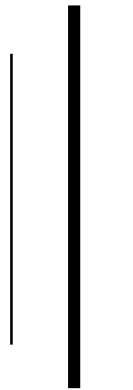
AGUSMAN, S.I.K

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75081004

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH KALIMANTAN BARAT  
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA



**LAMPIRAN “B”:**  
**MATRIK KINERJA DITPOLAIRUD POLDA KALBAR 2025-2029**



Pontianak, 15 September 2025

LAMP KEP DIRPOLAIRUD POLDA KALBAR  
NOMOR: KEP/ 3 / IX / 2025  
TANGGAL: 15 SEPTEMBER 2025

Matrik Kinerja Ditpolairud Polda Kalbar Tahun 2025-2029

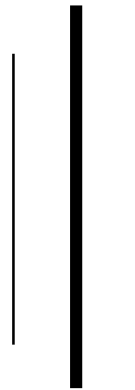
[illegible]

 **AGUSMAN, S.I.K.**  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75081004

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH KALIMANTAN BARAT  
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA



**LAMPIRAN “C”:  
MATRIK KINERJA DITPOLAIRUD POLDA KALBAR 2025-2029**



Pontianak, 15 September 2025

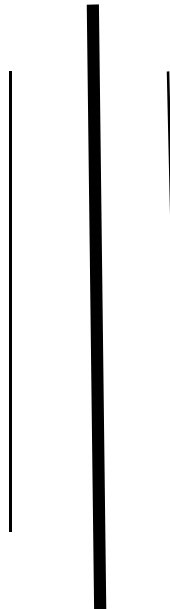
MATRIK KERANGKA PENDANAAN T.A. 2025-2029

| PROGRAM-GIAT-KRO-RO-SUMBER DANA                                                          | SUMBER DANA | BASELINE |                       |                       |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                          |             | 2025     | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  |
| <b>3137-Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana</b>      |             |          | <b>76,650,000</b>     | <b>76,650,000</b>     | <b>76,650,000</b>     | <b>76,650,000</b>     |
|                                                                                          | RM          |          | 76,650,000            | 76,650,000            | 76,650,000            | 76,650,000            |
|                                                                                          |             |          |                       |                       |                       |                       |
| <b>3141-Penyelenggaraan Laboratrium Forensik</b>                                         |             |          | <b>4,000,000</b>      | <b>4,000,000</b>      | <b>4,000,000</b>      | <b>4,000,000</b>      |
|                                                                                          | RM          |          | 4,000,000             | 4,000,000             | 4,000,000             | 4,000,000             |
|                                                                                          |             |          |                       |                       |                       |                       |
| <b>4342-Penindakan Tindak Pidana Perairan</b>                                            |             |          | <b>1,966,425,000</b>  | <b>1,966,425,000</b>  | <b>1,966,425,000</b>  | <b>1,966,425,000</b>  |
|                                                                                          | RM          |          | 1,966,425,000         | 1,966,425,000         | 1,966,425,000         | 1,966,425,000         |
|                                                                                          |             |          |                       |                       |                       |                       |
| <b>3128-Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Kemanan dan Ketertiban Masyarakat</b> |             |          | <b>1,109,232,000</b>  | <b>1,109,232,000</b>  | <b>1,109,232,000</b>  | <b>1,109,232,000</b>  |
|                                                                                          | RM          |          | 1,109,232,000         | 1,109,232,000         | 1,109,232,000         | 1,109,232,000         |
|                                                                                          |             |          |                       |                       |                       |                       |
| <b>3134-Penyelenggaraan Kepolisian Perairan</b>                                          |             |          | <b>141,600,000</b>    | <b>141,600,000</b>    | <b>141,600,000</b>    | <b>141,600,000</b>    |
|                                                                                          | RM          |          | 141,600,000           | 141,600,000           | 141,600,000           | 141,600,000           |
|                                                                                          |             |          |                       |                       |                       |                       |
| <b>3073-Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri</b>                                |             |          | <b>27,101,833,000</b> | <b>27,101,833,000</b> | <b>27,101,833,000</b> | <b>27,101,833,000</b> |
|                                                                                          | RM          |          | 27,101,833,000        | 27,101,833,000        | 27,101,833,000        | 27,101,833,000        |
|                                                                                          |             |          |                       |                       |                       |                       |

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH KALIMANTAN BARAT  
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA

**LAMPIRAN “D”:** `

**KERANGKA REGULASI DITPOLAIRUD POLDA KALBAR TAHUN 2025-2029**



Pontianak, 15 September 2025

### MATRIKS KERANGKA REGULASI

| No | Arah Kerangka<br>Regulasi<br>dan/atau kebutuhan<br>Regulasi                                                                                                   | Urgensi<br>Pembentukan<br>Berdasarkan<br>Evaluasi<br>Regulasi Eksisting,<br>Kajian dan Penelitian                                                                | Unit<br>P. Jawab       | Unit<br>Terkait/<br>Institusi | Target Penyelesaian                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                        |                               |                                                                                                                                        |
| 1. | Peraturan Kapolri<br>Nomor 23 Tahun 2010<br>tentang<br>Pengesahan<br>Nomenklatur Dan<br>Titelatur Susunan<br>Organisasi Polri<br>tingkat Polres dan<br>Polsek | a. hasil reviu, perlu<br>dilakukan<br>pembentukan<br>Satpolaires pada 5<br>Polres yang<br>memiliki wilayah<br>perairan tetapi<br>belum terbentuk<br>Satpolairres | Ro.rena<br>Ditpolairud |                               | Perubahan Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang SOTK Tingkat Polres dan Polsek menyesuaikan perpol nomor 14 tahun 2018 tentang SOTK Polda |

Ditetapkan di: Pontianak  
Pada Tanggal: 15 September 2025



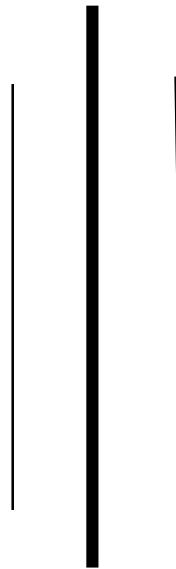
DIREKTUR POLAIRUD POLDA KALBAR

AGUSMAN, S.I.K.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75081004

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH KALIMANTAN BARAT  
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA

**LAMPIRAN “E”:  
KERANGKA KELEMBAGAAN DITPOLAIRUD POLDA KALBAR TAHUN 2025-2029**



**Pontianak, 15 September 2025**

## MATRIKS KERANGKA KELEMBAGAAN

| No | SASARAN STRATEGIS                                       | STRATEGI                              | PROGRAM DAN KEGIATAN                   | SASARAN          | TARGET         |                |                |                |                |
|----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |                                                         |                                       |                                        |                  | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
| 1  | 2                                                       | 3                                     | 4                                      | 5                | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             |
| 1. | Pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani | a. penataan organisasi tingkat Polres | 1) Pembukaan skeleton Satpolair Polres | Sesuai kebutuhan | 1 Sat polairud | 1 Sat polairud | 1 Sat Polairud | 1 Sat polairud | 1 Sat polairud |

Ditetapkan di: Pontianak  
Pada Tanggal: 15 September 2025



AGUSMAN, S.I.K.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75081004